



BPKD Ciamis

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2026



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. Soejoed No. 14 A Telp. (0265) 771032 C I A M I S



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkah dan kehendak-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 dapat diselesaikan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah berakhir pada Tahun 2024 serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 yang simultan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis untuk 2 (dua) tahun ke depan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Renstra BPKD ini juga disusun karena adanya perubahan Struktur Organisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 dan juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan di Kabupaten Ciamis sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis ini kami susun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu dua tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Ciamis menuju mantapnya kemandirian ekonomi, Sejahtera untuk semua.

Dalam hal penyusunannya, tentu saja baik secara materil maupun penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun demikian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan



yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Ciamis, Januari 2024

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

ASEP DEDI HERDIANA.,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650912 199301 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD.....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi BPKD	14
2.2. Sumber Daya BPKD	30
2.3. Kinerja Pelayanan BPKD	36
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	45
3.1. Permasalahan Pelayanan BPKD	45
3.2. Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BPKD	49
4.2. Cascading Kinerja BPKD	50
BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII PENUTUP	73



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai BPKD berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai BPKD berdasarkan Golongan	30
Tabel 2.3. Data Pegawai BPKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2.4. Data Sarana dan Prasarana	32
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD	36
Tabel 2.6. Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Ciamis	39
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD menurut kelompok Belanja Tahun 2019 - 2023	40
Tabel 2.8. Kelompok Sasaran Layanan BPKD	42
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan	46
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran	49
Tabel 4.2. Cascading Kinerja BPKD	50
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel 6.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKD ..	59
Tabel 7.1. Indikator Kinerja BPKD	71
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama BPKD	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKD	28
Gambar 2.2. Grafik Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin	29
Gambar 2.3. Grafik Komposisi PNS berdasarkan Golongan	31
Gambar 2.4. Grafik Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan	32
Gambar 2.5. Diagram Proses Bisnis Layanan	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah berakhir pada Tahun 2024 serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 maka disusunlah dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026, yang simultan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Renstra perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah pembangunan daerah.

Selanjutnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis tahun 2025-2026 sebagai acuannya. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode dua tahun sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis . Tahun 2025-2026 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah berakhir pada Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 96 Tahun 2022 tentang uraian fungsi kelompok substansi pada organisasi jabatan administrator dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024 - 2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Ciamis;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPD Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD Kabupaten Ciamis;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN, Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RENSTRA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 *Latar Belakang,* Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENSTRA, proses penyusunan RENSTRA, keterkaitan antara dokumen RENSTRA dengan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 *Dasar Hukum Penyusunan,* Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA, baik yang berskala nasional, maupun lokal
- 1.3 *Maksud dan Tujuan,* Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RENSTRA bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RENSTRA bagi daerah yang bersangkutan.
- 1.4 *Sistematika Penulisan,* Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENSTRA terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD KABUPATEN CIAMIS, menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah kedepannya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat identifikasi tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaah mengenai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 -2026, penentuan isu strategis lainnya. memuat tentang isu strategis dalam pelaksanaan kinerja pelayanan BPKD.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Ciamis.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

3.2 Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, membahas mengenai rumusan pernyataan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026 serta Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, mengemukakan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah kedepannya dalam mencapai tujuan dan asaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat mengenai rencana program dan kegiatan serta Subkegiatan perangkat daerah selama 2 (dua) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif. memuat tentang rencana program dan kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Ciamis selama 2 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat :

1. penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

BAB VIII PENUTUP, berisi kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen RENSTRA. memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra BPKD Tahun 2025-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



KEPALA BADAN

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Badan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja badan;



-
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan hubungan media;
 - d. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;

-
- e. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundangundangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pengelolaan perlengkapan Badan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Substansi Perencanaan

Kelompok Substansi Perencanaan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 96 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan kegiatan publikasi, dokumentasi, pemberitaan dan hubungan antar lembaga;



- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kelompok Substansi Keuangan

Kelompok Substansi Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 96 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
- b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan belanja BPKD;
- f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan verifikasi penyusunan Rancangan APBD.



-
- (3) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan rencana anggaran daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan Rancangan APBD;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan APBD;
 - d. pembinaan dan verifikasi penyusunan Rancangan APBD;
 - e. penyusunan SOP dan regulasi perencanaan anggaran daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah

- (1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (2) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran daerah.
- (3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan Rancangan KUA/PPAS;
 - b. pelaksanaan koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD/PPKD;
 - c. koordinasi penyusunan anggaran Hibah, Bansos, BTT, Pembiayaan;
 - d. koordinasi bahan kebijakan rencana anggaran daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



B. Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah

- (1) Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (2) Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi perencanaan anggaran daerah.
- (3) Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan verifikasi penyusunan Rancangan KUA/PPAS;
 - b. pelaksanaan verifikasi dan pembinaan penyusunan RKA-SKPD/PPKD;
 - c. pelaksanaan penyusunan SOP dan regulasi perencanaan anggaran daerah;
 - d. verifikasi bahan kebijakan rencana anggaran daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan dan pengelolaan Kas Daerah.
- (3) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :



-
- a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perbendaharaan dan kas daerah;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. pengoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan perbendaharaan daerah dan pengelolaan kas daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Perbendaharaan dan kas daerah; dan
 - f. pelaporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pengelolaan kas daerah.
- (3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - b. Menyelenggarakan Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah dan Buku Pembantu yang diperlukan;
 - c. Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana (SPD);
 - d. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran, dokumen perintah membayar dan dokumen penghentian pembayaran;
 - e. Penerbitan SP2D atas pengeluaran belanja daerah;



-
- f. pelaksanaan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas atas SP2D dengan Rekening Koran;
 - g. pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
 - h. pelaksanaan verifikasi penerimaan/pendapatan daerah dan pengeluaran kas SKPD;
 - i. fasilitasi pengelolaan pinjaman, utang dan piutang daerah; j. pelaksanaan pengelolaan kas non anggaran berupa potongan IWP, Taperum, Taspen, Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi, PPh, PPN;
 - j. penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
 - k. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Rekening Bendahara, pejabat pengelola keuangan daerah;
 - l. fasilitasi pembinaan, pelaksanaan monitoring dan monitoring kepada Bendahara SKPD;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Perbendaharaan dan Dana Perimbangan

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan perbendaharaan dan dana perimbangan/ dana transfers.



-
- (3) Sub Bidang Perbendaharaan dan Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Perbendaharaan dan dana perimbangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan dan pembinaan teknis pengeluaran belanja daerah;
 - d. verifikasi penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan/dana transfer;
 - e. pengelolaan dan pelaporan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan;
 - f. monitoring dan evaluasi penerimaan dana perimbangan;
 - g. penyusunan regulasi dan pemantauan pelaksanaan transaksi Non Tunai;
 - h. pelaksanaan dan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) penatausahaan;
 - b. penyajian informasi penerimaan dan pengeluaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - c. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyajian informasi keuangan daerah per periode.

- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan pelaporan keuangan daerah;
 - b. pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi akuntansi barang milik daerah;
 - e. monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas pelaporan keuangan daerah;
 - f. koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - g. pelaporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

- (1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pembiayaan.

-
- (3) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - b. pelaksanaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - c. pembinaan kepada pengelola sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. penyiapan bahan penyajian informasi laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

- (1) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - b. penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan laporan semesteran dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;



-
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - d. penyiapan bahan-bahan dan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan SKPD/SKPKD sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk bahan pemeriksaan audit eksternal dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - b. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. penyusunan pedoman petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan barang dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian barang dan perlengkapan pada pengelola barang;
 - f. penyelenggaraan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang milik daerah;



-
- g. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah untuk daerah pemekaran;
 - j. pelaksanaan Penatausahaan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - l. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan kebutuhan barang milik daerah.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah;
 - b. pengadaan barang dan jasa barang milik daerah;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
 - d. pemindahtanganan barang milik daerah;
 - e. penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



B. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah

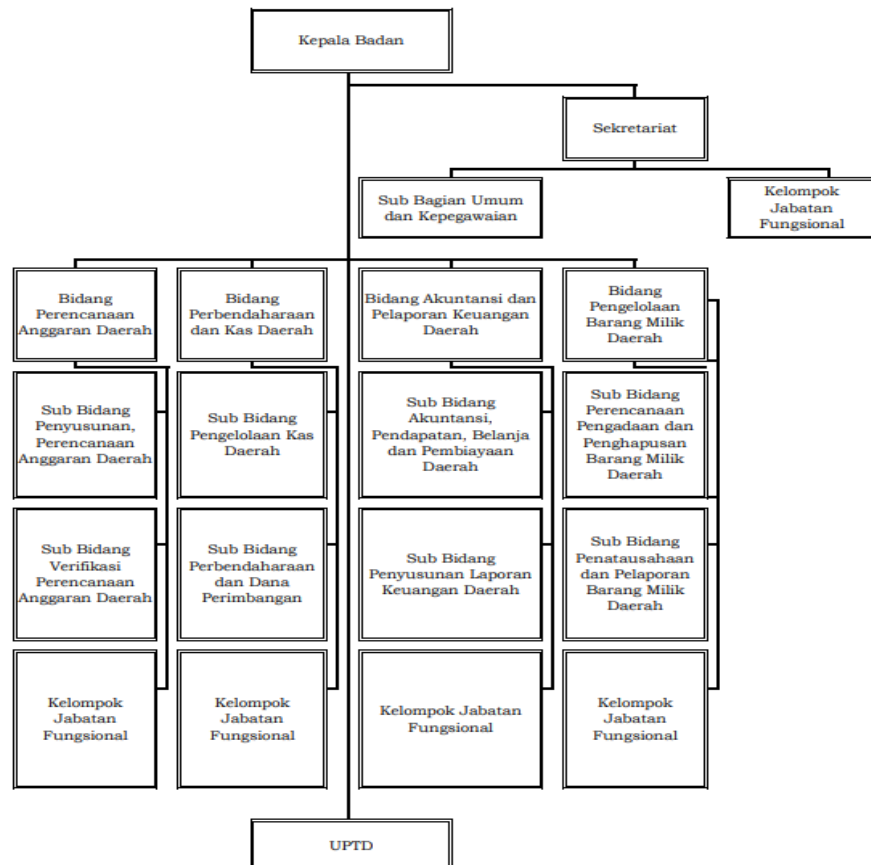
- (1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah.
- (3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - b. penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (5) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- (6) Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis



Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2. Sumber Daya BPKD

Adapun komposisi pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan per Januari 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS				
1	Kepala BPKD	1		1
2	Sekretariat	5	9	14
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	5	3	8
4	Bidang Akuntansi dan Palaporan Keuangan Daerah	1	6	7
5	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	2	5	7
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	3	11
JUMLAH PNS		22	26	48
PPPK				
1	PPPK	2	1	3
NON PNS				
1	Jasa Kebersihan	8		8
2	Administrasi	17	13	30
3	Keamanan	6		6
4	Sopir	5		5
JUMLAH NON PNS		36	13	49
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		60	40	100

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh Pegawai BPKD per Januari 2024 adalah sebanyak 100 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 48 Orang, PPPK sebanyak 3 orang, Non PNS sebanyak 49 Orang, yang secara keseluruhan terdiri dari 60 Orang Laki-laki atau 60% dan 40 Orang Perempuan 40%.

Adapun Grafik Komposisi Pegawai BPKD berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.2. Grafik Komposisi Pegawai BPKD berdasarkan Jenis Kelamin





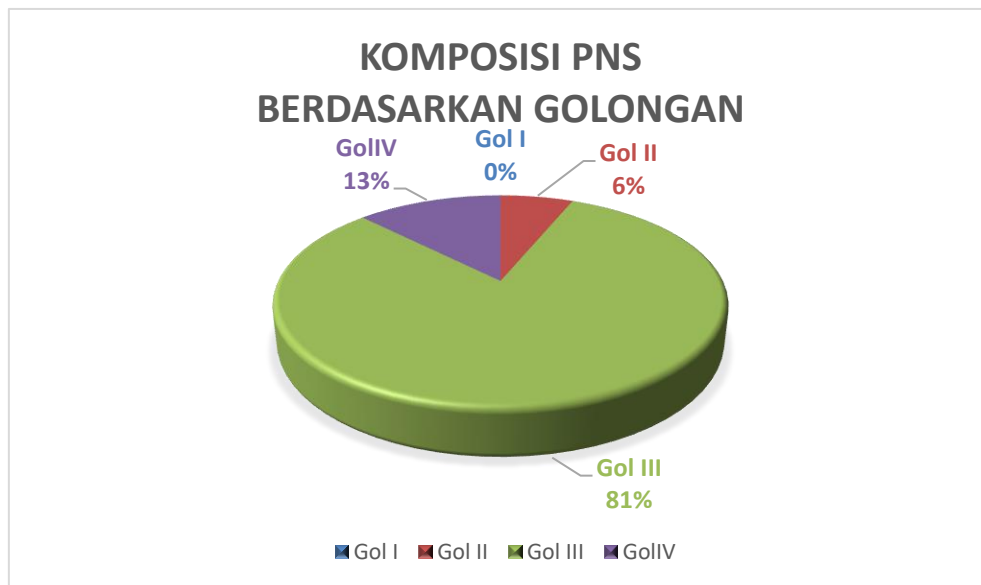
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PNS	GOLONGAN																			
			IV						III					II					I			
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D
1	Kepala BPKD	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	14	1	-	-	-	-	2	2	6	2	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	8	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4	Bidang Akuntansi dan Palaporan Keuangan Daerah	7	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	7	1	-	-	-	-	1	2	2	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	9	-	-	1	1	2	-	-	-	-
Jumlah Per Golongan		48	5	0	1	-	-	6	10	12	2	15	39	-	-	1	2	3	-	-	-	-

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai PNS BPKD Kabupaten Ciamis per Januari 2024 berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 39 orang atau 81%. kemudian disusul oleh golongan IV sebanyak 6 orang atau 13%, golongan II sebanyak 3 orang atau 6%.

Gambar 2.3. Grafik Komposisi PNS berdasarkan Golongan



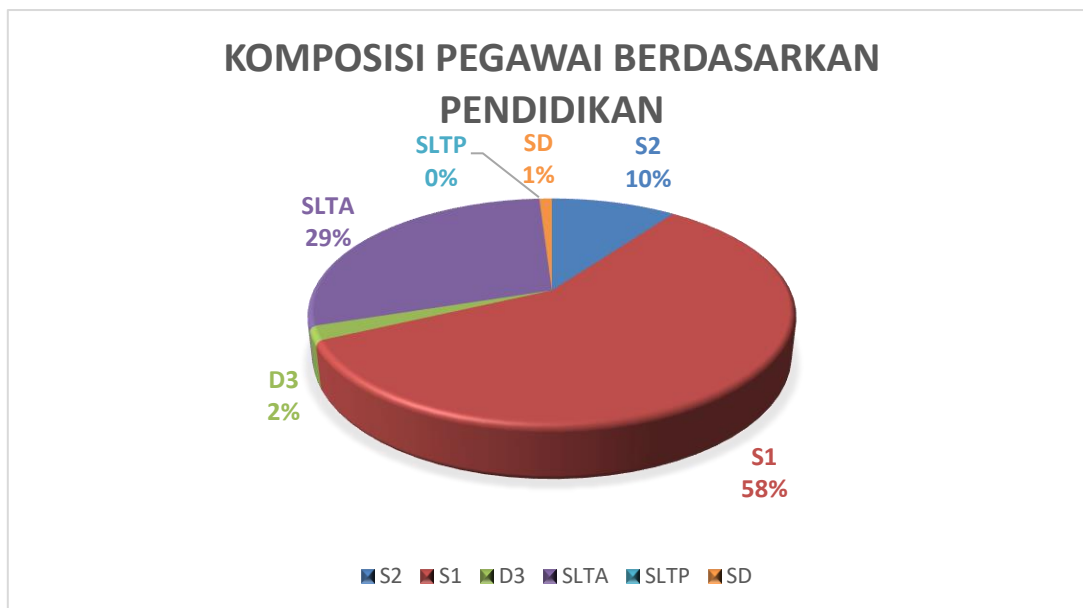
Tabel 2.3. Data Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS										
1	Kepala BPKD	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	7	-	-	4	-	-	14
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	2	4	-	-	2	-	-	8
4	Bidang Akuntansi dan Palaporan Keuangan Daerah	-	1	7	-	-	-	-	-	8
5	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	-	1	7	-	-	-	-	-	8
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1	9	-	-	2	-	-	12
Jumlah PNS dan PPPK			8	35	-	-	8	-	-	51
NON PNS										
1	Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-	8	-	-	8
2	Administrasi	-	2	22	-	2	4	-	-	30
3	Keamanan	-	-	-	-	-	5	-	1	6
4	Sopir	-	-	1	-	-	4	-	-	5
Jumlah Non PNS		-	2	23	-	2	21	-	1	49

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

Dari tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai PNS, PPPK dan Non PNS BPKD Kabupaten Ciamis per Januari 2024 berdasarkan Pendidikan S2 sebanyak 10 orang atau 10%, S1 sebanyak 58 orang atau 58%, D3 sebanyak 2 Org atau 2%, SLTA sebanyak 29 orang atau 29%, SD masing-masing 1 orang atau 1%.

Gambar 2.4. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berikut data sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis :

Tabel 2.4. Data Sarana dan Prasarana

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	4769 m ²			
2	Gedung Kantor	8003 m ²			
3	Gedung Aula (belakang Pol PP)	01 Unit			
4	Bangunan UPTB Cihaurbeuti	484 m ²			
5	Kendaraan Roda 4 (Empat)	08 unit	08 unit	0 unit	0 unit
6	Kendaraan Roda 2 (Dua)	24 unit	24 unit	0 unit	0 unit
7	Mesin Pompa air PMK	11 unit	11 unit	0 buah	0 buah
8	Scanner (Universal Tester)	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
9	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
10	Rak-Rak Penyimpan	44 buah	44 buah	0 buah	0 buah
11	Lemari Penyimpan	13 buah	13 buah	0 buah	0 buah
12	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
13	Mesin Penghitung Uang	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
14	Lemari Besi/Metal	44 buah	44 buah	0 buah	0 buah
15	Lemari Kayu	36 buah	36 buah	0 buah	0 buah
16	Rak Besi + Rak Kayu	122 buah	122 buah	0 buah	0 buah
17	Filing Cabinet Besi	42 buah	42 buah	0 buah	0 buah
18	Brandkas	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
19	Lemari Kaca	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
20	CCTV - Camera Control Television System	23 unit	23 unit	0 buah	0 buah
21	Papan Visual/Papan Nama	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
22	Alat Penghancur Kertas	22 buah	22 buah	0 buah	0 buah
23	Mesin Absensi	7 buah	7 buah	0 buah	0 buah
24	Alat Pemotong Kertas	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
25	White Board Electronic	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
26	Mesin Laminating	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
27	Genset	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
28	Meja Kerja Kayu	107 buah	107 buah	0 buah	0 buah
29	Kursi Kayu	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
30	Sice	9 buah	9 buah	0 buah	0 buah
31	Meja Rapat	9 buah	9 buah	0 buah	0 buah
32	Meja Resepsionis	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
33	Meja Panjang	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
34	Meja 1/2 Biro	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
35	Kursi Rapat	437 buah	437 buah	0 buah	0 buah
36	Kursi Tamu	42 buah	42 buah	0 buah	0 buah
37	Kursi Putar	27 buah	27 buah	0 buah	0 buah
38	Kursi Biasa	13 buah	13 buah	0 buah	0 buah
39	Kursi Lipat	152 buah	152 buah	0 buah	0 buah
40	Sofa	21 buah	21 buah	0 buah	0 buah
41	Meja Biro	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
42	Kursi Teras	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
44	Mesin Pemotong Rumput	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
45	Lemari Es	9 buah	9 buah	0 buah	0 buah
46	A.C. Split	49 buah	49 buah	0 buah	0 buah
47	Kipas Angin + Exhaust Fan	87 buah	87 buah	0 buah	0 buah
48	Kompas Gas (Alat Dapur)	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
49	Loudspeaker	12 buah	12 buah	0 buah	0 buah
50	Wireless	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
51	Microphone	14 buah	14 buah	0 buah	0 buah
52	Unit Power Supply	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
53	Camera film	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
54	Handy Cam	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
55	Alat Pemadam/Portable	9	9	0 buah	0 buah
56	Tombol Kebakaran/Alarm	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
57	Hidran Kebakaran	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
58	Meja Kerja Pejabat Eselon	25 buah	25 buah	0 buah	0 buah
59	Meja Tamu Biasa	6 buah	6 buah	0 buah	0 buah
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon	20 buah	20 buah	0 buah	0 buah
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	152 buah	152 buah	0 buah	0 buah
62	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	40 buah	40 buah	0 buah	0 buah
63	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	38 buah	38 buah	0 buah	0 buah
64	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	51 buah	51 buah	0 buah	0 buah
65	Audio Amplifier	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
66	Audio Distribution	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
67	Microphone/Wireless MIC	6 buah	6 buah	0 buah	0 buah
68	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
69	Power Amplifier	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
70	Camera + Attachment	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
71	Proyektor + Attachment	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
72	Camera Electronic	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
73	Tripod Camera	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
74	Lensa Kamera	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
75	Layar Film/Projector	5 set	5 set	0 buah	0 buah
76	Character Effect Interface	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
77	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
78	Telephone (PABX)	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
79	Handy Talky (HT)	8 set	8 set	0 buah	0 buah
80	Facsimile	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
81	Unit Tranceiver Ssb Portable	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
82	Wireless Amplifier	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
83	Unit Pemancar HF/SW Transportable	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
84	Unit Pemancar SHF Transportable	43 buah	43 buah	0 buah	0 buah
85	Antene UHF Transportable	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
86	Switcher Antena Lain-Lain	43 buah	43 buah	0 buah	0 buah



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
87	Self Supporting Tower	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
88	Mast Tower	11 buah	11 buah	0 buah	0 buah
88	Switcher/Menara Antena Lain-Lain	43 unit	43 unit	0 buah	0 buah
89	Compressor Amplifier	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
90	Leather Case For Metal Container	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
91	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
92	Tools	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
93	Screen	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
94	Exhaust Fan	13 buah	13 buah	0 buah	0 buah
95	Alat Crimp Tester	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
96	Meja Kerja	21 buah	21 buah	0 buah	0 buah
97	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
98	Fire Extinguisher	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
99	Smoke Detecting System & Alarm	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
100	Glove Box (Radiation Detector)	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
101	Modular Counting And Scientific Electronic Lain-Lain	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan BPKD

Kinerja Pelaksanaan APBD

Capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2019- 2023.

Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2023 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini.



Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Permen PAN & RB No. 14 Thn. 2017 ttg Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleng. Pelayanan Publik			81.25	88.31	88.75	89.00	89.25	81.25	93.47	93.5	93.29	89.73	100	105.84	105.35	104.82	100.53
2	Hasil Evaluasi AKIP BPKD	Permen PAN & RB No. 12 Thn. 2015 ttg Pedoman Eva luasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Opini BPK-RI	Uu No. 15 Thn 2004 ttg Pelaksanaan pengelolaan & tanggungjawa b Keuangan Negara			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Level Maturitas SPIP BPKD				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
4	Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD	Permendagri Nomor 19 Thn. 2020 ttg Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah			760	765	770	775	780	765	834	813.56	803.46	826	100.66	109.02	105.66	103.67	105.90
5	Tepat Waktu Penyampaian Raperda APBD	Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Ketepatan waktu penetapan APBD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	Permendagri No. 47 Thn. 2021 ttg Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, & Pelaporan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Permendagri No. 18 Thn 2020 ttg Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Thn. 2019 ttg Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			12,00	12,00	15,00	19,00	22,00	10,40	11.69	9.47	8.18	7.97	86.67	97.42	63.13	43.05	36.23
10	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer Expenditures)				2,95	2,95	2,56	2,29	22.34	4,00	3.64	4.97	4.45	8.20	135.59	123.39	194.14	194.32	36.71



11	Opini Laporan Keuangan (TPB16)				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				6	6	8,6	11,2	13,8	10	5.40	7.49	8.38	38.09	166.67	90.00	87.09	74.82	131.09
13	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				9	16	18	20	22	9	5.56	14.56	33.08	24.58	100.00	34.75	80.89	165.40	111.73
14	Managemen Aset				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
15	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya				11	4	3,5	3	2,5	11	3.64	1.99	3.04	9.30	100.00	91.00	56.86	101.33	104.00

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

Tabel diatas merupakan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu Tahun 2019-2023. Rata-rata indikator kinerja sudah mencapai target yang secara umum dilihat dari % rata-rata capaian sasaran sudah melebihi target.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Adapun interpretasi terhadap predikat capaian kinerja, baik yang tercapai melebihi target (>100%), tercapai sesuai target (=100%) maupun yang tidak tercapai (<100%) dilakukan dengan menggunakan referensi pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan dengan kategori/kriteria sebagai berikut :

Persentase Capaian Kinerja	Kategori/ Predikat
≥ 90,00 %	Sangat Baik
75,00% - 89,99%	Baik
65,00% - 74,99%	Cukup
50,00% - 64,99%	Kurang
≤ 49,99 %	Sangat Kurang

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi



Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemeriksa yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini BPK-RI

Menurut BPK, Laporan Keuangan yang disebut di atas telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.6. Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Ciamis

No	Tahun	Opini BPK RI
1	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undang.

Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2018–2023 dapat dilihat dari tabel 2.6 dibawah ini :



Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis menurut Kelompok Belanja Tahun 2019-2023

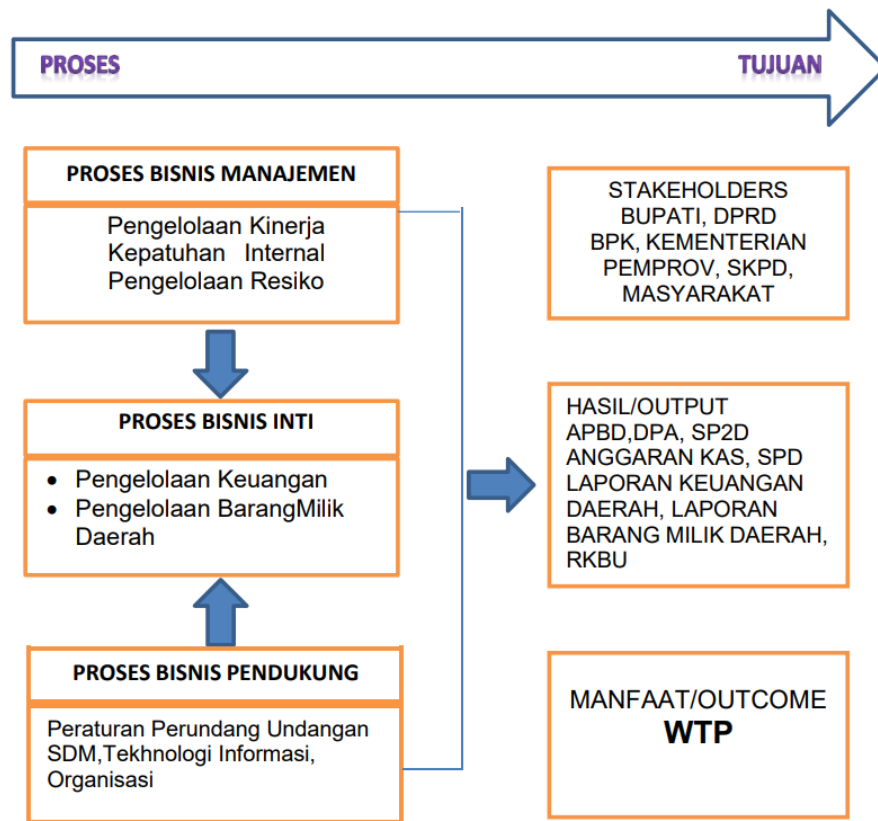
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi anggaran tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata	Anggaran	Realisasi
BELANJA OPERASI	42,888,799,100	36,982,445,675	72,279,056,990	49,043,412,380	46,347,079,321	39,395,935,502	34,500,067,837	66,087,904,344	45,807,498,856	39,197,419,076	91.9	93.3	91.4	93.4	84.6	90.9	11.01	8.50
Belanja Pegawai	26,051,631,800	21,398,059,175	48,452,070,418	19,254,914,220	9,915,307,961	24,351,670,138	20,572,999,616	44,156,853,569	17,273,108,872	9,014,961,350	93.5	96.1	91.1	89.7	90.9	92.3	(0.05)	(2.39)
Belanja Barang dan Jasa	16,837,167,300	14,914,386,500	20,469,878,172	23,250,128,716	16,421,771,360	15,044,265,364	13,388,748,221	18,772,727,475	22,022,187,850	15,682,865,178	89.4	89.8	91.7	94.7	95.5	92.2	2.51	4.43
Belanja Bunga	-	-	-	3,585,069,444	15,010,000,000	-	-	-	3,585,069,444	14,499,592,548	-	-	-	-	96.6	19.3	79.67	76.11
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	670,000,000	3,357,108,400	2,953,300,000	5,000,000,000	-	538,320,000	3,158,323,300	2,927,132,690	-	-	80.3	94.1	99.1	-	54.7	114.58	94.84
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	9,042,529,100	5,471,059,850	4,636,130,100	5,596,133,322	4,646,174,636	5,718,964,992	4,590,450,931	3,869,293,988	4,124,474,535	4,554,657,220	63.2	83.9	83.5	73.7	98.0	80.5	(12.76)	(4.60)
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	9,600,000,000	2,812,989,269	4,850,000,000	-	-	144,336,454	2,170,949,768	1,192,179,000	-	-	1.5	77.2	24.6	20.7	0.43	339.75
BELANJA TRANSFER	-	-	492,362,763,600	489,430,801,586	515,791,671,422	-	-	491,095,496,104	488,013,096,388	495,460,857,203	-	-	99.7	99.7	96.1	59.1	1.20	0.22
Belanja Bagi Hasil	-	-	4,759,058,000	5,358,241,000	9,079,300,399	-	-	4,186,605,200	4,705,889,000	4,989,184,400	-	-	88.0	87.8	55.0	46.1	20.51	1.51
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	487,603,705,600	484,072,560,586	506,712,371,023	-	-	486,908,890,904	483,307,207,388	490,471,672,803	-	-	99.9	99.8	96.8	59.3	0.99	0.37
Jumlah Belanja	51,931,328,200	42,453,505,525	578,877,950,690	546,883,336,557	571,634,925,379	45,114,900,494	39,090,518,768	561,197,030,890	540,116,019,547	540,405,112,499	86.9	92.1	96.9	98.8	94.5	93.8	311.08	329.64

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

Pada Tabel. 2.7. Rasio Belanja Pendanaan Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun 2019 - 2023 adalah sebesar 93,8%, dengan Anggaran dan Realisasi menurut Kelompok Belanja Tahun 2019-2023, dapat dilihat rasio Belanja Operasi rata-rata sebesar 90,9% dengan Pertumbuhan Anggaran tiap tahunnya sebesar 11,01% dan Pertumbuhan Realisasinya sebesar 8,50% pertahun, sedangkan menurut kelompok Belanja Modal, rasio rata-rata sebesar 80.5%, dengan pertumbuhan anggaran tiap tahunnya menurun sebesar 12,76% pertahun dan pertumbuhan realisasinya menurun sebesar 4,60% pertahun. Belanja Tidak Terduga, rasio rata-rata sebesar 20,7% dengan Pertumbuhan anggaran sebesar 0,43% pertahun dan Pertumbuhan Realisasinya sebesar 339,75% pertahun. Rasio Belanja Transfer Rata-rata sebesar 59.1%, dengan Pertumbuhan anggaran sebesar 1,20% pertahun dan pertumbuhan realisasi sebesar 0.22% pertahun.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, adapun kelompok sasaran layanan dari Proses untuk mencapai tujuan Tata Kelola Pemerintahan urusan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien serta berkualitas, dapat dilihat pada Gambar proses bisnis layanan dibawah ini.



Gambar2.5. Diagram Proses Bisnis Layanan

Adapun kelompok sasaran Layanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.8. Kelompok Sasaran Layanan BPKD

No.	Instansi	Bidang Urusan
Instansi Daerah		
1	DPRD Kabupaten Ciamis	- Terkait pembahasan dan Penetapan Perda Pertanggungjawaban dan Pelaporan APBD - Penyusunan Rancangan APBD
2	Sekretariat Daerah	koordinasi penyusunan Rancangan kebijakan serta Koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas.
3	Inspektorat	Terkait pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
4	Bappeda Kabupaten Ciamis	Terkait Penyusunan Rancangan APBD
5	Bapenda	Terkait Data Pendapatan Daerah
6	DPMD Kabupaten Ciamis	Terkait Bantuan Keuangan Desa
7	Seluruh SKPD Kabupaten Ciamis	Terkait Pengelolaan Keuangan daerah dari Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban
8	BUMD (PDAM, Perumda BPR	- Terkait Penyertaan Modal



No.	Instansi	Bidang Urusan
	Galuh, PT. LPK Artha Galuh Mandiri, PT. LKM Ciamis, Perumda Galuh Perdana)	- Laporan Keuangan BUMD sebagai bagian dari LKPD - Permintaan Data
9	Pemerintah Desa	Koordinasi Penyertifikatan Tanah Pemda
Instansi Vertikal		
1	Kementerian Keuangan	Koordinasi dan Konsultasi Penyaluran Pendapatan Transfer dan Pelaporan/ penyerapan APBD serta kordinasi terkait Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang baru
2	Kementerian Dalam Negeri	Koordinasi dan Konsultasi Pelaporan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah serta terkait Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang baru
3	Bank Indonesia	Terkait data dan Penyerapan Laporan Realisasi APBD
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Terkait Penyaluran Pendapatan Transfer dan Pelaporan/ penyerapan APBD serta kordinasi terkait Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang baru
5	Badan Pusat Statistik	Terkait Data pelengkap LKPD
6	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Terkait Rekonsiliasi Data dan Setoran BPJS
7	Badan Pertanahan Nasiona (BPN)	Terkait Penyertifikatan Tanah
8	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah
9	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Terkait Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah
10	Kantor Pajak Pratama	Terkait data Perpajakan
11	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Terkait Pelelangan Barang Milik Daerah
Hubungan dengan Instansi Lainnya		
1	PT TASPEN (Persero)	Terkait Asuransi Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian serta Laporan Belanja Pegawai
2	PT. PLN (Persero)	Terkait Penerimaan Pajak
3	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, (Bank BJB)	Sebagai Kas Daerah
4	Lembaga Keuangan/ Perbankan (BRI, Mandiri)	- Sebagai bank persepsi - Pinjaman BPR
5	Masyarakat	Terkait Sewa Bangunan dan tanah Pemda

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan BPKD

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Keuangan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan Fungsi BPKD dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat, stakeholder dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan Pengelolaan Keuangan yang tidak boleh diabaikan.

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama dua tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan kewenangan daerah di bidang Keuangan. Kelancaran dan keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, dukungan stakeholder serta anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2019-2024) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ciamis sebagai berikut :

1. Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, dapat dilihat Data hasil temuan pemeriksaan BPK RI Tahun 2022, ada 8 Temuan dari 56 SKPD di Kabupaten Ciamis.
2. Ketidak Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah, hal ini diakarenakan ada beberapa SKPD yang rentang kendalinya jauh dan asetnya banyak, yaitu sebanyak 4 SKPD yang rentang kendalinya jauh dan asetnya banyak, berdasarkan data tahun 2022 dari 56 SKPD yang menyampaikan laporan Barang Milik Daerah, sebanyak 43 SKPD yang tepat waktu sedangkan sisanya 8 SKPD yang kurang/tidak tepat waktu.
3. Masih terdapat Aset Pemda yang belum bersertifikat. Data aset Pemda Per Desember 2022 Total Aset sebanyak 1.023 bidang, bersertifikat 654, belum bersertifikat 369. Data asset Pemda 31 Desember 2023 bertambah sebanyak 15 bidang tanah dan bangunan atau menjadi 1038 Bidang, bersertifikat 685 bidang atau naik sebesar 4,74% dibandingkan tahun 2022, dan sisanya belum bersertifikat sebanyak 353 bidang.
4. Sistem Informasi Keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih dalam tahap pengembangan, terutama pada tahapan Penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban, hal ini mengakibatkan keterlambatan proses input data anggaran, input data pencairan keuangan pertanggungjawaban sampai pelaporan yang juga berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1. Opini BPK Terhadap LKPD	Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan	Kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah
	Sistem Informasi Keuangan	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih dalam tahap pengembangan
2. Prosentase capaian jumlah bidang tanah milik pemda yang masih belum bersertifikat	Masih banyak asset Pemda yang belum disertifikat	Pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis belum optimal terkait dokumen perolehan & bukti kepemilikan
3. Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	Ada beberapa SKPD yang rentang kendali Pengelolaan BMD yang luas serta banyaknya Barang milik daerah yang dikelola

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2. Isu Strategis

Isu strategis Pembangunan terkait dengan permasalahan Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman SDM pengelola kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sosialisasi dan pendampingan.
2. Optimalisasi kegiatan Koordinasi, rekonsiliasi secara terus menerus baik dari Kepala SKPD, pengurus barang sampai operator tiap SKPD agar penyusunan laporan Barang Milik Daerah bisa tepat waktu.
3. Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional serta memberikan pendampingan kepada SKPD baik pendampingan administrasi maupun pendampingan lapangan.
4. Penggunaan aplikasi pendamping SIPD dalam hal Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis maka dirumuskan tujuan dan sasaran Tahun 2025-2026 yang menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan yang dijabarkan ke dalam sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BPKD

Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional, berkualitas dan akuntabel.

Indikator : Opini BPK

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran, yaitu:

- Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
1. Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD.
 2. Indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP BPKD.
 3. Indikator sasaran Level Maturitas SPIP BPKD.
 4. Indikator sasaran Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD
- Sasaran 2** : Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu.
- Sasaran 3** : Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah, dengan indikator sasaran Persentase Barang Milik Daerah Daerah Yang Terkelola.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran*	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja	
				2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional, berkualitas dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik
			Hasil Evaluasi AKIP	BB	A
			Opini BPK (TPB16)	WTP	WTP
			Level Maturitas SPIP	3	3
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	90,27	90,29
			Level Maturitas SPIP BPKD	3	3
			Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	790	790
			Hasil Evaluasi AKIP BPKD	BB	BB
		Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100	100
			Persentase Ketepatan waktu penetapan APBD	100	100
		Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terkelola	90	95

4.2. Cascading Kinerja BPKD

proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah digambarkan dengan Cascading Kinerja.

Berikut ini Cascading Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Ciamis mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.



Tabel 4.2. Cascading Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
URUSAN KEUANGAN DAERAH				
Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional, berkualitas dan akuntabel.			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
			Hasil Evaluasi AKIP	
			OPINI BPK	
			Level Maturitas SPIP	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD
				Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD
				Maturitas SPIP Perangkat Daerah
				Hasil Penilaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan kegiatan pengadministrasi umum
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Presentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu
			Presentase Ketepatan waktu penetapan APBD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	% Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD Perubahan yang Diverifikasi
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dikelola dengan baik
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bagi Hasil I Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	%SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD yang disusun
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2025-2026, maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis selama 2 tahun kedepan.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola keuangan daerah dalam lingkup kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah Pengelola Keuangan Daerah dalam lingkup kabupaten, tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dukungan teknis fungsi penunjang



urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya. Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang Keuangan yang dikaitkan dengan kebiakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis dalam dua tahun mendatang, tercantum dalam tabel 5.1 dalam Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien		
Sasaran	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional, berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan sistem Pelayanan Publik	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras
		Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan anggaran BPKD.	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan anggaran BPKD.
		Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja BPKD	1. Optimalisasi penyusunan pengelolaan dan pelaporan keuangan Perangkat daerah
	Meningkatkan Kualitas	Optimalisasi Kualitas	1. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan



	Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Perencanaan anggaran, Penatausahaan serta Pelaporan keuangan Daerah melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah	pertanggungjawaban dan pelaporan SKPD 2. Mengoptimalkan penatausahaan pengelolaan keuangan perangkat daerah
	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Barang Milik Daerah melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah

Sumber : Data diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta disesuaikan dengan kebijakan pusat maka Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah sehingga dirumuskan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah
3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah
5. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik daerah.

Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan serta subkegiatan-subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis untuk periode selama 2 (dua) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 berikut ini.



Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi			
						Tahun 2025		Tahun 2026							
						Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional, berkualitas dan akuntabel.				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik		Baik		Baik					
				Hasil Evaluasi AKIP	B	BB		A		A					
				Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP					
				Level Maturitas SPIP	3	3		3		3					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	90.25	90.27	14,457,947,000	90.29	14,832,806,000	90.29				
					100%	100%	3,811,539,000	100%	3,992,813,000	100%					
					5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan kegiatan pengadministrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	1,192,703,000	12 Bulan	1,243,036,000	12 Bulan		
					X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	93,897,000	2 Paket	98,591,000	2 Paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
					X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	250,000,000	4 Paket	265,000,000	4 Paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
					X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	106,995,000	3 Paket	112,344,000	3 Paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	150,575,000	3 Paket	158,103,000	3 Paket	Sekretariat	BPKD Ciamis					



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	245,836,000	2 Dokumen	258,128,000	2 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	256,000,000	12 Laporan	257,000,000	12 Laporan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	89,400,000	12 Dokumen	93,870,000	12 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	2,618,836,000	12 Bulan	2,749,777,000	12 Bulan		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	410,655,000	12 Laporan	431,187,000	12 Laporan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,208,181,000	12 Laporan	2,318,590,000	12 Laporan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2,609,967,000	100%	2,710,484,000	100%		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46 Unit	46 Unit	1,131,771,000	46 Unit	1,185,859,000	46 Unit		
		X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 unit	133,770,000	5 unit	140,458,000	5 unit	Sekretariat	BPKD Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	150,000,000	1 Unit	155,000,000	1 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	131,601,000	10 Unit	138,181,000	10 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	716,400,000	30 Unit	752,220,000	30 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	87 Unit	87 Unit	1,478,196,000	87 Unit	1,524,625,000	87 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	32 Unit	391,650,000	32 Unit	411,232,000	32 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	480,000,000	15 Unit	476.500.000	15 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	7,580,000	2 Unit	7,979,000	2 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	598,966,000	4 Unit	628,914,000	4 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
				Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD	Predikat BB	Predikat BB		Predikat BB				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan BPKD	100%	100%	8,036,441,000	100%	8,129,509,000	100%		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	41,811,000	2 Dokumen	43,901,000	2 Dokumen	Sekretariat BPKD Ciamis	
		X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7,350,000	1 Laporan	7,717,000	1 Laporan	Sekretariat BPKD Ciamis	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	34,461,000	1 Laporan	36,184,000	1 Laporan	Sekretariat BPKD Ciamis	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih	230 orang	230 orang	482,388,000	230 orang	506,505,000	230 orang		
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	60,039,000	1 Paket	63,040,000	1 Paket	Sekretariat BPKD Ciamis	
		X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	23,814,000	20 Orang	25,004,000	40 Orang	Sekretariat BPKD Ciamis	
		X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	200 Orang	200 Orang	346,035,000	200 Orang	363,336,000	200 Orang	Sekretariat BPKD Ciamis	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	52,500,000	10 Orang	55,125,000	10 Orang	Sekretariat	BPKD Ciamis
				Maturitas SPIIP Perangkat Daerah	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100%	100%	262,118,000	100%	275,223,000	100%		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	262,118,000	5 Dokumen	275,223,000	5 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	235,265,000	1 Dokumen	247,028,000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,880,000	1 Dokumen	6,174,000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,880,000	1 Dokumen	6,174,000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7,743,000	1 Dokumen	8,130,000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7,350,000	1 Dokumen	7,717,000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
				Hasil Penilaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	785	790		790	790			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	39 Dokumen	39 Dokumen	7,250,124,000	39 Dokumen	7,303,880,000	39 Dokumen		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/Bulan	57 Orang/Bulan	7,000,000,000	57 Orang/Bulan	7,050,000,000	57 Orang/Bulan		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	195,000,000	12 Dokumen	196,000,000	12 Dokumen	Sekretariat BPKD Ciamis	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	24,806,000	12 bulan	26,046,000	12 Dokumen	Sekretariat BPKD Ciamis	
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16,096,000	1 Laporan	16,901,000	1 Laporan	Sekretariat BPKD Ciamis	
		X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	14,222,000	2 Laporan	14,933,000	2 Laporan	Sekretariat BPKD Ciamis	
	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah			Presentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		
				Presentase Ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%		100%		100%		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	% Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan	100%	100%	8,233,942,000	100%	9,035,636,000	100%	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1,393,250,000	12 Dokumen	1,462,912,000	12 Dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	157,500,000	1 Dokumen	165,375,000	1 Dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD Perubahan yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	52,500,000	1 Dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	278,000,000	2 dokumen	291,900,000	2 dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	278,250,000	2 dokumen	292,162,000	2 dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 dokumen	4 dokumen	105,000,000	4 dokumen	110,250,000	4 dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	1 dokumen	262,000,000	1 dokumen	275,100,000	1 Dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	55 Orang	55 Orang	262,500,000	55 Orang	275,625,000	55 Orang	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dikelola dengan baik	61 Dokumen	61 Dokumen	1,257,298,000	100%	1,320,162,000	100%	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	168,347,000	12 Dokumen	176,764,000	12 Dokumen	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	12 Dokumen	157,500,000	12 Dokumen	165,375,000	12 Dokumen	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	175,000,000	12 Dokumen	183,750,000	12 Dokumen	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	52,500,000	12 Laporan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kab. Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	169,428,000	12 Dokumen	177,899,000	12 Dokumen	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97 Orang	97 Orang	537,023,000	97 Orang	563,874,000	97 Orang	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu	52 Dokumen	52 Dokumen	1,583,394,000	100%	1,662,562,000	100%	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan	136,836,000	1 Laporan	143,677,000	1 Laporan	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	182,962,000	12 Dokumen	192,110,000	12 Dokumen	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	526,821,000	12 Laporan	553,162,000	12 Laporan	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	341,922,000	12 Laporan	359,018,000	12 Laporan	Bidang Aklap	Kab. Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	107,835,000	2 dokumen	113,226,000	2 dokumen	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	52,500,000	12 Dokumen	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	28 Orang	28 Orang	237,018,000	28 Orang	248,869,000	28 Orang	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	48 Laporan	48 Laporan	4,000,000,000	48 Laporan	4,590,000,000	48 Laporan	PPKD - BPKD	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	1,500,000,000	12 Laporan	PPKD - BPKD	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	1,500,000,000	12 Laporan	1,540,000,000	12 Laporan	PPKD - BPKD	Kab. Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	12 Laporan	550,000,000	12 Laporan	PPKD - BPKD	Kab. Ciamis
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bagi Hasil I Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	PPKD - BPKD	Kab. Ciamis
	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah		Presentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			90%		95%		95%		
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	%SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	4,034,731,000	100%	4,803,938,000	100%	BPKD	Kab. Ciamis
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD yang susun	41 Laporan	41 Laporan	4,034,731,000	100%	4,803,938,000	100%	BPKD	Kab. Ciamis
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	190,000,000	224500000	224,500,000	1 dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000,000	12 Dokumen	2,050,000,000	12 Dokumen	Bidang PBMD	Kab. Ciamis
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	559,000,000	2 laporan	571,315,000	2 laporan	Bidang PBMD	Kab. Ciamis
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	545,000,000	1 laporan	560,000,000	1 laporan	Bidang PBMD	Kab. Ciamis
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	195,000,000	1 laporan	204,750,000	1 laporan	Bidang PBMD	Kab. Ciamis
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	160,000,000	12 Dokumen	198,000,000	12 Dokumen	Bidang PBMD	Kab. Ciamis



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	385,731,000	1 dokumen	995,373,000	1 dokumen	Bidang PBMD	Kab. Ciamis

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 2 (dua) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2025	2026	
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
1	Perencanaan dan Keuangan				
1.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8.60	8,70	8,80	8,80
1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	5.08	4.51	4.52	4.52
1.6	Opini Laporan Keuangan (TPB16)	9 Kali WTP	WTP	WTP	WTP
4	Manajemen Keuangan				
4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	38,09	7.28	7.28	7.28
4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	24.58	6.69	6.69	6.69
4.3	Managemen Aset	3	4	4	4
4.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9.30	1.63	1.63	1.63
5	Transparansi dan Partisipasi Publik				
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100	100	100	100



Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	90,27	90,29	90,30
2	Hasil Evaluasi AKIP BPKD.	BB	BB	BB
3	Level Maturitas SPIP BPKD	3	3	3
4	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	790	790	790
5	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%
6	Ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100%
7	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	95%	95%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan dalam kerangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan serta subkegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Kabupaten Ciamis.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Keuangan dan atau target kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. LKIP itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis di masa



yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis ini.

Ciamis, Januari 2024

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

ASEP DEDI HERDIANA.,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650912 199301 1 003

